

BEAS PERELEK: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PURWAKARTA

BEAS PERELEK: SOCIETY EMPOWERING IN PURWAKARTA REGENCY

Nandang Rusnandar

Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat
Jalan Cinambo No. 136 Ujungberung-Bandung 42094
e-mail: nd_roes@yahoo.co.id

Naskah Diterima: 27 Juni 2016

Naskah Direvisi: 25 Juli 2016

Naskah Disetujui: 19 Agustus 2016

Abstrak

Beas perelek, merupakan tradisi lama yang terlupakan, kini dihidupkan kembali oleh Bupati Purwakarta. Tujuannya sebagai salah satu strategi dalam pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam satu upaya memenuhi kebutuhan dasar warga. Manfaatnya untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan khususnya dalam mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat. Di samping itu manfaat lainnya memberi makna teladan, melatih jiwa berkorban dari hal yang paling kecil, melatih kebersamaan dan kepedulian antar sesama dan semangat gotong royong. Namun dalam perkembangannya, akan menghadapi tantangan dan mengalami perubahan mengingat budaya lokal ini tidak lepas dari budaya global melalui inovasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pranata sosial (ekonomi) dalam program beas perelek sebagai sebuah pemberdayaan bagi masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Setelah dicermati, ternyata dalam program beas perelek memiliki nilai-nilai yang bersinergi dengan falsafah hidup manusia Sunda, yaitu silih asah, silih asih dan silih asuh. Beas perelek ini representasi dari nilai-nilai itu semua. Oleh karena itu perlu peran pemerintah daerah dalam melestarikan sikap hidup yang berazaskan kebersamaan. Beas perelek merupakan solusi atas persoalan kesenjangan sistem sosial karena kalangan masyarakat yang sudah mampu dapat berbagi pada masyarakat kurang mampu.

Kata kunci: beas perelek, pemberdayaan.

Abstract

Beas perelek is a long forgotten tradition, now it is being revived by the Regent of Purwakarta. The goal is as one of the strategies in the distribution of development and community empowerment in an effort to meet the basic needs of citizens. The benefit is to raise community awareness and participation in development, especially in poverty alleviation and public welfare. In addition, the other benefits are exemplary, sacrifice of the smallest things, bonding and caring between people and the spirit of mutual cooperation. But in its development, it faces challenges and changes considering the local culture cannot be separated from global cultural economy through innovation. This study aims to describe social institutions (economy) in beas perelek program as an empowerment for people in Purwakarta. After the observation, the beas perelek program have values that are in synergy with the philosophy of human life of Sunda, that is silih asah, silih asih, silih asuh. Beas Perelek is a representation of those values. Therefore, it needs local government's role in preserving the life attitude based on the principle of togetherness. Beas perelek is a solution to the problem of social inequality system since the community that has been able to share to disadvantaged communities.

Keywords: beas perelek, empowering.

A. PENDAHULUAN

Pada masa Orde Baru, perencanaan program pembangunan selalu ditetapkan oleh pemerintah pusat (*top down planning*), dengan konsep penyeragaman terhadap strategi pembangunan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini, pada akhirnya hanya berperan sebagai objek pembangunan saja. Pola kebijakan yang bersifat penyeragaman ini sering tidak berhasil dan menimbulkan krisis ekonomi. Krisis ekonomi di Indonesia dapat memberikan kesadaran bahwa strategi pembangunan semacam itu kurang tepat, sehingga muncul kesadaran akan potensi lokal yang kurang dimanfaatkan dan dioptimalkan dalam pembangunan. Potensi lokal masyarakat merupakan modal sosial (*social capital*) bagi pembangunan nasional.

Pasca Orde Baru runtuh dan kemudian disusul oleh era reformasi, isu sentralisasi ikut runtuh pula dan muncullah era desentralisasi yang dibingkai demokrasi, sehingga dinamika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara semakin dinamis. Pengaturan yang bersifat sentral menyebabkan kemiskinan dan marginalisasi masyarakat desa. Maka dengan desentralisasi diharapkan mampu merevitalisasi otonomi daerah.

Apalagi ketika otonomi daerah bergulir dan sekarang sudah berjalan, setiap daerah perlu memahami dan mengenal potensi lokal (budaya lokal) sebagai modal sosial dalam pembangunan daerahnya sendiri. Keberadaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab serta memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa (Setiawan, 2011: 18). Dalam praktiknya Sarundajang (2000:35) menyatakan bahwa pembangunan pada umumnya

berorientasi pada modernisasi ala kapitalisme yang menggeser jati diri budaya lokal. Hal ini ditandai dengan terganggu dan berkurangnya nilai-nilai budaya asli yang dilembagakan (pranata sosial). Karena dengan memahami dan mengenal budaya lokalnya sendiri, berarti jalan ke arah pembangunan akan lebih mudah dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh dampak pembangunan. Budaya lokal dapat dimanfaatkan sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan.

Di tatar Sunda (Provinsi Jawa Barat), mengenal nilai-nilai yang berlaku dalam tata kehidupan bermasyarakat yang diwujudkan dalam falsafah "*silih asih, silih asah, silih asuh*". Merupakan falsafah hidup yang sangat melekat pada hati setiap individu masyarakat Jawa Barat. Motto ini menjadi pedoman setiap individu dalam menghadapi segala bentuk fenomena kehidupan ini, baik di lingkungan terkecil (keluarga) maupun dalam kancah yang lebih luas lagi (negara). *Silih asih* merupakan ungkapan rasa atau tingkah laku yang memperlihatkan *silih pikanyaah, silih pikaasih, silih pikaheman* (saling menyayangi). Kata *asih*, memiliki arti yang sangat luas, menunjuk pada sikap individu yang sangat refleksif terhadap dirinya, seperti etos kerja, aktif, adanya dedikasi, dapat berkompromi, disiplin, bertanggungjawab, sabar, pengorbanan, ekspresi diri, realitas hidup, adanya kejujuran, rasa kepuasan hati dalam bekerja sama, rasa keindahan, rasa duka yang dapat dirasionalisasikan atau disublimasikan.

Silih asah yaitu saling memberi, curah pendapat '*silih seukeutan elmu pangaweruh*' atau '*silih tambahan pangalaman*'. Arti *silih asah* itu adalah cara untuk memperkaya pengetahuan dan ilmu baik secara lahir maupun batin, serta dalam praktiknya harus ada dua belah pihak, yaitu yang diasah dan yang mengasah. Yang memberi tahu dan yang diberitahu. Dalam *silih asah* ini mengandung unsur: Semangat dan keinginan, mampu mengendalikan diri, bermetode,

sabar, *bruk-brak* (keterbukaan), kejujuran, berkelanjutan, *ngaropea* (pengelolaan), kreativitas, inovatif, *mere pangajen* (menilai), berani diuji, proaktif, berjuang, kualitas diri, komunikasi, dan sinergik.

Silih Asuh dapat disimpulkan dalam kata yang lebih populer yaitu proporsional dan profesional. Unsur *silih asuh* itu adalah adanya kesamaan hak, saling menghargai, kerelaan, berkorban, mengetahui posisi diri, kejujuran, adil, sinatria, regenerasi, penghormatan, kaderisasi, pengakuan, *kaweningan hate* (kebersihan hati), tanggung jawab, dan *rasa sauyunan* (kebersamaan) (Suryalaga, 1995).

Nilai-nilai *silih asih*, *silih asah*, *silih asuh* tersebut dapat difungsikan sebagai alat untuk mengatasi salah satu masalah kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya yang ada dalam masyarakat Sunda. Falsafah hidup *silih asih*, *silih asah*, *silih asuh* sebagai modal sosial, dapat diimplementasikan dengan budaya lokal lainnya seperti *beas perelek* yang mulai digulirkan kembali. Selama ini dibiarkan dan diabaikan tanpa perhatian sedikitpun dari pemerintah daerah. Padahal budaya lokal dapat berkontribusi dalam pembangunan, baik itu sebagaiantisipasi ataupun memberi solusi.

Akhir-akhir ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan kabupaten yang sangat dinamis dalam mengejar ketertinggalan sehingga pembangunan di sana sini mulai digiatkan dan dapat langsung dirasakan oleh rakyatnya. Mulai terasa ketika Bupati Dedi Mulyadi menjabat sebagai kepala daerahnya. Kabupaten Purwakarta awalnya, merupakan daerah yang merasa tertinggal oleh daerah lain. Padahal letak geografis Kabupaten Purwakarta berada di tengah-tengah antara ibukota Provinsi Jawa Barat yaitu Bandung dengan ibukota Republik Indonesia yaitu Jakarta.

Dedi Mulyadi sebagai kepala daerah mencoba untuk memberdayakan masyarakatnya melalui berbagai potensi yang dimilikinya, salah satu contoh dengan

digulirkannya kembali budaya lama yaitu *beas perelek* yang selama ini diabaikan.

Dalam studi-studi mengenai perubahan sosial, konsep ‘pemberdayaan’ (*empowerment*) merupakan antitesis dari konsep ‘pembangunan’ (*development*). Konsep ‘pembangunan’ lebih mencerminkan hadirnya model perencanaan dan implementasi kebijakan yang bersifat *top-down*, elitik, sedangkan ‘pemberdayaan’ lebih bersifat *bottom-up*, berbasis kepentingan konkret masyarakat (Aziz, 2005: 133-134 dalam Kusnadi, 2006:1). Pemberdayaan merupakan terjemahan dari *empowerment*. Menurut Merriam Webster dan *Oxford English Dictionary*, kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu (1) *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan. Dengan demikian, secara garis besar pengertian pemberdayaan mengandung dua unsur; (1) *to give or enable to*, yakni upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program-program pembangunan agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan; (2) *to give power or authority to*, yakni memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas kepada masyarakat agar memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan dalam rangka pembangunan diri dan lingkungannya secara mandiri. Dalam konteks seperti itu, kemandirian diartikan sebagai kemandirian material, yaitu kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan materi dasar serta cadangan dan mekanisme untuk dapat bertahan pada waktu krisis (Setiawan, 2011:28-29).

Kusnadi (2006:34), mengatakan bahwa kebijakan dan program pemberdayaan selama ini lebih banyak dipahami sebagai upaya menangani residu yang ditimbulkan oleh proses-proses pembangunan. Padahal, seharusnya isu pember-

dayaan masyarakat sudah menyatu (*included*) di dalam kebijakan atau proses pembangunan, sehingga secara otomatis program pemberdayaan dapat mengantisipasi sejak dini atau meminimalisasi dampak negatif dari proses pembangunan yang sedang berlangsung. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, sehingga bersifat *people-centered, participatory, empowering, and sustainable* (Chambers, 1995, dalam Kartasasmita, 1997:22). Dalam kerangka pemikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari (a) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*); memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. (Kartasasmita, 1997:24-32).

Kebersamaan antarsesama dalam menjalani kehidupan khususnya pada masyarakat perkotaan, Emile Durkheim (1893) menamakan hal itu dengan istilah solidaritas. Ia membagi dua macam solidaritas, *pertama*: solidaritas mekanik, yaitu solidaritas yang terbangun antara sesama manusia yang didasari akar-akar humanisme serta besarnya tanggungjawab dalam kehidupan sesama. Solidaritas tersebut mempunyai kekuatan sangat besar dalam membangun kehidupan harmonis antarsesama. Oleh karena itu, landasan solidaritas tersebut lebih bersifat lama dan tidak temporer. Ikatan utama pada solidaritas ini adalah kepercayaan bersama, cita-cita dan komitmen moral. Homogenitas serupa itu hanya mungkin kalau pembagian kerja bersifat sangat minim. *Kedua*, solidaritas organik. Bentuk hubungan antarsesama selalu dilandaskan pada hubungan sebab akibat (kausalitas), bukan pada kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan. Hubungan yang terjalin lebih bersifat fungsional sehingga lebih temporer sifatnya. Solidaritas organik muncul karena pembagian kerja bertambah besar. Solidaritas ini didasarkan pada

tingkat saling ketergantungan yang tinggi, saling ketergantungan itu bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dalam pembagian pekerjaan, yang memungkinkan bertambahnya perbedaan di kalangan individu (Jhonson, 1986 : 181-187).

Menurut Durkheim (1893), pembagian kerja meningkatkan suatu perubahan dalam struktur sosial dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik. Namun pertumbuhan dalam pembagian kerja tidak menghancurkan kesadaran kolektif, tetapi mengurangi arti pentingnya dalam pengaturan kehidupan sehari-hari. Hal ini memberikan lebih banyak ruang untuk otonomi individu dan heterogenitas sosial, tetapi tidak harus membuat individu menjadi terpisah sama sekali dari ikatan sosial yang didasarkan pada konsensus moral.

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat yaitu melalui *beas perelek* yang merupakan program pemerintah Kabupaten Purwakarta, serta bagaimana pula melihat nilai-nilai budaya yang menjadi falsafah hidup masyarakat Sunda dapat selaras dengan program ini. *Beas perelek* dalam perkembangannya akan menghadapi perubahan-perubahan serta tantangan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Secara umum kajian akan dikaitkan pada tantangan yang dihadapi, perubahan sosial dan konteks keilmuan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang *beas perelek* sebagai pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Purwakarta ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif, tujuannya untuk mendeskripsikan secara gamblang atau tepat sifat-sifat suatu gejala sosial. Oleh karena itu pendekatannya adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknis pengumpulan informasi dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap beberapa tokoh lokal dan tokoh-tokoh lainnya serta kajian pustaka. Metoda analisis data

dilakukan dengan pendekatan kualitatif, sehingga setiap informasi dan data yang diperoleh atau berhasil dihimpun dapat dideskripsikan yang kemudian dianalisis.

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta

Sifat kegotongroyongan (*sabilulungan* dan *rereongan*) bagi masyarakat Sunda sudah merupakan budaya yang tidak lepas dari kehidupan kesehariannya. Makna kata *sabilulungan* menunjukkan saling membantu dalam hal jasa, sedangkan *rereongan* lebih menunjuk pada makna saling membantu dalam hal ekonomi. *Sabilulungan* dan *rereongan* di pedesaan (Setiawan, 2011:14) banyak diimplementasikan dalam berbagai cara, seperti gotong royong dalam membersihkan jalan, membangun rumah, membuat saluran air, dan sebagainya, sedangkan gotong royong dalam bentuk *rereongan* terlihat dalam kegiatan iuran hajatan (arisan), *beas perelek*, dan sebagainya.

Untuk kegiatan *beas perelek* yang dilaksanakan di seluruh Jawa Barat, baru dilaksanakan pada tahun 1940. Sejak tahun 1940, dalam masyarakat Sunda diterapkan kegiatan yang dikenal dengan *beas perelek*, yaitu mengumpulkan beras sekitar satu sendok atau *canting* (takaran kurang lebih 2,5 deciliter) yang setiap bulannya dikumpulkan di lumbung desa. Hasil dari pengumpulan beras tersebut selanjutnya digunakan untuk menolong anggota masyarakat yang kelaparan termasuk fakir miskin khususnya pada musim paceklik. Kegiatan ini merupakan tradisi masyarakat Sunda yang dikenal dengan *rereongan* yaitu budaya untuk saling menolong antar-tetangga yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial dalam lingkup terbatas (Sekarningrum, 2008:20).

Kegiatan *beas perelek* dilaksanakan di seluruh wilayah Jawa Barat. Setiap keluarga pada setiap harinya mengumpulkan berasnya dengan perbandingan satu liter beras yang dimasak pada hari itu. *Beas perelek* yang dimasukkan ke dalam

bumbung awi yang digantungkan di depan rumah atau ditempelkan pada bilik rumah sebanyak satu sendok atau *canting*. Kemudian ketua kampung, memerintahkan kepada petugas khusus untuk datang mengambil *beas perelek* tersebut pada hari-hari tertentu yang sudah disepakati, biasanya satu kali dalam satu pekan. Hasil penarikan *beas perelek* tersebut dikumpulkan di lumbung desa. Biasanya ketua kampung (*punduh*) akan mendata warga yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan dengan segera, maka beras yang terkumpul tersebut akan diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, *beas perelek* dapat dipergunakan untuk pembangunan wilayahnya.

Namun dalam perkembangannya tradisi *beas perelek* ini hilang ditelan masa, baik akibat gejolak revolusi yang sedang terjadi pada masa kemerdekaan ataupun oleh situasi ekonomi yang kurang mendukung masyarakat pada waktu itu. Walaupun sebenarnya manfaat dari kegiatan ini sangat dirasakan oleh masyarakat pada waktu itu, khususnya dalam penanggulangan masalah kemiskinan dan kesejahteraan.

Baru kemudian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bergerak melalui Instruksi Gubernur Jawa Barat No. 2/1995 tentang Peningkatan Kepedulian dan Peran Serta Masyarakat dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, yang dimanifestasikan melalui Gerakan *Rereongan Sarupi*. Pemerintah Jawa Barat sangat menyadari bahwa di Jawa Barat masih cukup banyak masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang belum tertangani, maka Instruksi Gubernur tersebut dimaksudkan untuk mengambil langkah-langkah konkret ke arah pelestarian sikap hidup yang berasaskan kebersamaan dan gotong royong, sekaligus meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Kebijakan *Rereongan Sarupi* dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai sosial yang bersifat kegotongroyongan (*rereongan*). Kata *sarupi* yaitu akronim dari *seratus*

rupiah saumpi (seratus rupiah satu keluarga) terkesan sebagai bentuk iuran (mobilisasi) tetapi nilai utamanya adalah kegotongroyongan dan partisipasi. *Rereongan Sarupi* adalah kegiatan masyarakat secara sukarela yang mempunyai dasar kuat sebagai bagian dari usaha untuk membangun masyarakat modern dan mandiri (*civil society*) dan mempunyai landasan keagamaan yang kuat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan *Rereongan Sarupi* berhenti seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Jawa Barat sebagai penggagasnya.

Dengan hilangnya gerakan *Rereongan Sarupi*, kemudian muncullah Program *Raksa Desa*, yaitu program yang mengupayakan dan mewujudkan kualitas sumber daya manusia dalam menanggulangi angka kemiskinan masyarakat Jawa Barat yang cenderung bertambah setiap tahunnya, maka diperlukan sebuah tindakan yang cepat. Untuk itu, Program *Raksa Desa* diluncurkan yaitu berupa program bantuan stimulan berupa kucuran dana sebesar Rp. 1.000.000.000,00 untuk setiap desa. Dana tersebut diperuntukkan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, kegiatan ekonomi produktif berupa bantuan modal yang diberikan secara bergulir, dan untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun kegiatan ekonomi masyarakat. Program *Raksa Desa* diluncurkan pada tahun 2003 dengan tujuan melakukan akselerasi percepatan pembangunan di Jawa Barat dalam rangka pencapaian Visi Jawa Barat 2010, ternyata hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan.

Pada tahun 2010, untuk pemberdayaan masyarakat di Jawa Barat dimunculkan Program *Pembangunan Desa Mandiri Menuju Desa Peradaban* yang lahir berdasarkan Peraturan Gubernur No. 58 Tahun 2010, yang diformulasikan dalam bentuk bantuan keuangan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah desa dari sumber APBD sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) bagi setiap

desa terpilih, sehingga tidak semua desa yang ada di Jawa Barat mendapat bantuan ini. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh provinsi maka hanya ada 100 desa yang mendapatkan kucuran dana bantuan tersebut (Setiawan 2011: 121-129).

Sementara itu untuk menangani kemiskinan di wilayah perkotaan, diluncurkan program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan sehingga dapat terbangun gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal (Buku Pedoman Umum P2KP-3, Edisi Oktober 2005).

Secara khusus di Pemerintahan Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 1 Februari 2016, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, mengeluarkan Surat Edaran No. 511.1/211/Kesra tentang Gerakan Empati Penggunaan Bahan Pangan, yang berisikan anjuran, salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat dengan *beas perelek* sebagai upaya ketahanan pangan masyarakat, secara efektif mulai dilaksanakan pada bulan itu juga.

Dalam rangka memupuk sikap empati di tengah-tengah keberagaman tingkat kemampuan ekonomi masyarakat serta efisiensi konsumsi bahan pangan seperti beras, terigu, daging, minyak goreng, gula dan garam sebagai bentuk upaya ketahanan pangan masyarakat, diperlukan keteladanan dan kebersamaan untuk melakukan kegiatan yang mendukung hal-hal dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebagai penyelenggaraan pemerintahan di daerah menhimbau sebagai berikut:

1. Bagi pejabat Eselon II, III, IV serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta, Kepala Sekolah/Guru, serta para Lurah/Kepala Desa, Dharma Wanita, Penggerak PKK, Ketua

RT/RW untuk melakukan puasa secara teratur selama 2 (dua) hari setiap minggu bagi yang mampu melakukannya sebagaimana yang biasa dilakukan selama ini. Selanjutnya untuk jenis puasa diserahkan sepenuhnya kepada keyakinan dan agama yang dianut masing-masing.

2. Bagi seluruh komponen masyarakat yang memiliki kemampuan, agar kembali melakukan gerakan *Beas Perelek* dengan cara menyisihkan beras sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gelas beras setiap harinya untuk kemudian disimpan oleh Ketua RT di lingkungannya masing-masing yang sewaktu-waktu dapat diberikan kepada warga yang tidak mampu dan membutuhkan.
3. Masyarakat agar tetap mengonsumsi bahan pangan dengan baik dan berkualitas. Apabila memiliki keterbatasan kemampuan dalam membeli dan mendapatkan bahan pangan agar segera menghubungi Ketua RT/RW atau Pemerintahan Desa setempat.

Demikian untuk menjadi maklum dan dipedomani sebagaimana mestinya.

2. Deskripsi Pranata Ekonomi:

Beas Perelek

Sebetulnya Kabupaten Purwakarta bukan merupakan daerah rawan pangan, namun pemerintah berupaya untuk mengantisipasi bila terjadi kesulitan bagi warganya, dengan membuat program *Beas Perelek*, yang di dalamnya terdapat subsidi silang antarwarga yang mampu dengan kurang mampu.

Menurut *Kamoes Basa Soenda*: “*perelek dilarapkeun kana sora barang leutik nu murag*”. (suara yang dihasilkan oleh jatuhnya benda kecil) (Satjadibrta, 1948:283). Pengertian kata *perelek* dalam bahasa Sunda merupakan *onomatope* dari suara yang dihasilkan ketika beras dimasukkan ke dalam bumbung bambu atau ke dalam tempat penampungan yang biasa terbuat dari bambu itu biasa terdengar

suara '*plerek plerek plerek*' sehingga disebut *beras perelek*.

Tujuan dihidupkannya kembali budaya lama ini, yaitu untuk menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial di antara warga di wilayah terkecil yakni rukun tetangga atau RT. Diharapkan pula akan timbul tali persaudaraan yang tinggi, si kaya dan si miskin pun saling menyayangi dan saling menghormati satu sama lainnya, terutama di lingkungan tetangga. Di samping itu dengan adanya program *Beas Perelek* ini diharapkan dapat berbagi kepada masyarakat lain yang membutuhkan bantuan. Manfaat lainnya akan membantu meringankan beban warga yang kekurangan bahan pangan, merekatkan masyarakat dan adanya pemerataan kesejahteraan masyarakat serta sebagai simpanan (lumbung) dalam penanggulangan bencana atau masa paceklik.

Ketika Pemerintah Kabupaten Purwakarta, meluncurkan program *Beas Perelek*, ternyata di Desa Cilandak Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta, pengumpulan *beas perelek* ini sudah berlaku sejak dua tahun yang lalu yaitu tahun 2014. Meskipun pengumpulan *beas perelek* yang dianjurkan hanya $\frac{1}{2}$ gelas setiap harinya, hasilnya cukup banyak yaitu satu karung (kurang lebih 25 Kg) satu kali pengambilan dalam satu minggu untuk setiap RT.

Biasanya beras yang terkumpul dapat diberikan langsung kepada orang yang membutuhkannya atau dijual di bawah harga pasar. Sisanya diuangkan untuk memenuhi kebutuhan sosial lainnya, seperti pembangunan infrastruktur, membayar guru ngaji, membangun masjid, sampai memberi santunan kepada anak-anak yatim piatu.

Beas Perelek merupakan salah satu program dari Bupati Purwakarta, yang diberlakukan dan diselenggarakan pada tingkat RT di seluruh lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, yang meliputi 17 kecamatan, 183 desa dan 9 kelurahan. Program ini disambut dengan sangat antusias oleh seluruh warga, karena

dirasa banyak manfaatnya. Selain untuk mengentaskan kemiskinan, partisipasi masyarakat, juga di dalamnya mengandung nilai-nilai kegotongroyongan.

Seluruh kecamatan, desa, kelurahan, RW dan RT di Kabupaten Purwakarta melaksanakan program *beas perelek* ini dengan antusias. Hal ini disebabkan ada nuansa nostalgia yang terbangun kembali di antara warga yang dahulu pernah mendengar dari cerita orang tuanya. Tidak heran hampir seluruh warga menerimanya, karena program ini merupakan himbauan kepada keluarga (yang mampu) tapi antusias warga lainnya sangat menyambut program ini.

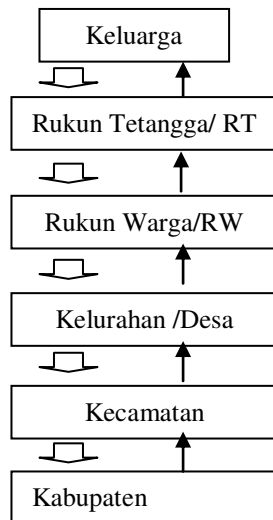
Setiap rumah (keluarga mampu) dapat mengumpulkan *beas perelek* dalam seharinya $\frac{1}{2}$ gelas beras yang dimasukkan ke dalam *bumbung awi*. Biasanya *bumbung awi* ditempatkan di depan dekat pintu atau ditempelkan pada tembok atau dinding di depan rumah agar memudahkan bagi petugas dalam pengambilannya. Di dalam pelaksanaannya, *beas perelek* dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan, petugas pengumpul *beas perelek* biasanya adalah ketua RT setempat dibantu oleh Linmas, yang dilaksanakan pada siang hari menjelang sore hari. Apabila pada waktu pengambilan *beas perelek* di salah satu rumah, *bumbung awi* masih kosong, maka petugas RT akan mengetuk pintu untuk mengingatkan, bahwa bumbungnya masih kosong. Si empunya rumah dapat menjawab minggu ini tidak ikut *rereongan beas perelek*, tapi diganti dengan uang, sesuai dengan kemampuannya. Hal ini dapat juga dilakukan. Dewasa ini, pengumpulan beras dapat dibedakan dari jenis beras yang berkualitas bagus dan beras berkualitas bulog, sehingga para petugas akan membawa dua karung beras yang berbeda. Kualitas beras bulog dan kualitas beras bagus sangat berbeda harganya, sehingga pengumpulan beras perlu dipisahkan. Hal ini untuk menjaga agar beras kualitas bagus dan bulog tidak menyatu sehingga tidak merusak harga. Bahkan ada pula

warga yang mengumpulkan langsung berupa uang yang sesuai dengan harga *beas perelek*.

Proses pengumpulan dan pengambilan dan penguliran *beas perelek* ini dapat dideskripsikan sebagai berikut: pertamanya setiap rumah atau keluarga menyimpan beras $\frac{1}{2}$ gelas ke dalam *bumbung awi* yang disimpan di (dinding) depan rumah, kemudian Ketua RT dibantu Linmas pada hari yang telah ditentukan biasanya dilaksanakan pada siang hari menjelang sore beras tersebut diambil (satu minggu satu kali). Mereka datang mengambil beras (a) beras berkualitas bagus, (b) beras berkualitas bulog; dan (c) bila ada yang langsung berupa uang. Ketua RT mencatat jumlah beras yang diterima dan mencatat berapa kebutuhan yang harus dikeluarkan. Ketua RT kemudian melaporkan kepada Ketua RW, Ketua RW kemudian mencatat laporan dari setiap RT dan dilaporkan ke kelurahan (desa). Kepala Kelurahan atau Kepala Desa melaporkan ke kecamatan dari kecamatan baru ke kabupaten. Setelah beras terkumpul, berapa kebutuhan untuk dibagikan kepada warga yang memerlukannya, sisanya diuangkan dan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan sosial lainnya. Untuk menjaga transparansi dari *beas perelek* ini, Pemerintah Kabupaten Purwakarta membuka *e-perelek* yang dapat diakses melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Purwakarta, yaitu purwakartakab.go.id. di sana akan terpampang logo di sebelah kanan dengan tulisan Info Pabeasan. Melalui laman resmi ini seluruh masyarakat Purwakarta dapat membuka dan mengecek berapa jumlah *beas perelek* yang ada di setiap keamatannya.

Berikut ini gambaran tentang prosedur pengumpulan *beas perelek*:

Prosedur Pengumpulan, pengambilan dan Pengguliran Beas Perelek



Keterangan:

- Alur pengumpulan *beas perelek*
- Alur pengguliran *beas perelek*

“Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit” pepatah itu menjadi kenyataan bagi warga setiap RT, ketika *beas perelek* yang dikumpulkan dari setiap rumah yang hanya ½ gelas setiap harinya, setelah sekian lama terkumpul, akhirnya dapat membantu warga yang membutuhkannya, bahkan sisanya dapat diuangkan, dengan rincian beras berkualitas baik dihargai sekitar Rp. 6.000,00 sedangkan beras kualitas bulog dihargai Rp. 3.000,00. Uang (setiap desa berbeda harganya) yang terkumpul digulirkan pada berbagai keperluan dan dapat dipergunakan membangun masjid, memperbaiki jalan kampung, membantu orang yang sakit, dan lain-lain. Sementara itu ada pula yang dipinjamkan untuk modal usaha dengan pengembalian yang sesuai dan tidak memberatkan warga.

Ketua RT pun dapat menentukan keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, seperti dipakai beli cat *bumbung awi* dan tong sampah, dipakai masak nasi liwet ronda, diberikan untuk bantuan

kepada warga sakit dan warga yang meninggal dunia, dibelikan bahan bakar mesin potong rumput, dipergunakan untuk biaya pengajian rutin, dipergunakan untuk Neonisasi sepanjang jalan kampung dan digunakan untuk memberi warga miskin.

Semenjak *beas perelek* dicanangkan pada bulan Februari 2016 hingga bulan September 2016, Untuk menjaga transparansi dan keterbukaan, maka Bupati Purwakarta membuka e-perelek. Jumlah beras dan uang yang terkumpul dari setiap kecamatan di Kabupaten Purwakarta dapat diketahui secara langsung. Di bawah ini akumulasi persediaan *beas perelek* sampai Tanggal 24 September 2016.

Tabel 1. Akumulasi Persediaan Beras Perelek Berdasarkan Kecamatan se-Kabupaten Purwakarta

Kecamatan	Beras (lt)	Uang (Rp)
Babakancikao	10.263	40.058.213
Bojong	8.164	2.394.955
Bungursari	19.988	53.219.476
Campaka	12.561	32.387.903
Cibatu	11.095	27.179.548
Darangdan	6.883	4.385.771
Jatiluhur	8.216	14.116.546
Kiarapedes	8.239	19.794.862
Maniis	6.993	84.654.500
Pasawahan	17.011	10.122.606
Plered	18.881	27.000.513
Pondoksalam	6.748	443.750
Purwakarta	6.448	5.748.919
Sukasari	690	2.900.678
Sukatani	26.389	21.518.870
Tegalwaru	10.245	24.896.092
Wanayasa	9.084	14.830.556

Sumber:

<http://daluwang.purwakartakab.go.id/laporan-eperelek/> Diunduh Tanggal 24 Sep 2016.

Baik beras maupun uang yang terkumpul, semuanya dapat dikembalikan kepada warga sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh tiap-tiap kecamatan hingga RT masing-masing. Pemerintah

Kabupaten akan mendistribusikan kembali hasil *beas perelek* ini untuk memenuhi kebutuhan yang ada di setiap daerah.

Tabel 2
Pemasukan / Pengeluaran Beras dan Uang
se-Kabupaten Purwakarta

Bulan	Pemasukan		Pengeluaran	
	Beras	Uang	Beras	Uang
Apr	137831	317340862	27272	120809515
Mei	23450	58498308	4288	15959086
Jun	26660	31346703	5499	8236204
Jul	18599	78060375	3704	5641163
Ags	28144	35445806	11654	10940411
Sep	9041	19015957	3410	15446690

Sumber:

<http://daluwang.purwakartakab.go.id/laporan-eperelek/> Diunduh Tanggal 24 Sep 2016.

3. Tantangan yang Dihadapi

Gerakan *Beas Perelek* sebagai sebuah pranata ekonomi yang menerapkan budaya gotong royong (*rereongan* dan *sabilulungan*) dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini menghadapi sebuah tantangan, dengan adanya pergeseran nilai seiring dengan kemajuan ekonomi, teknologi dan informasi pada masyarakat di mana budaya lokal tersebut berlaku. Sedangkan globalisasi datang dengan inovasi ekonomi ke seluruh dunia serta penyesuaian-penyesuaian politis dan budaya yang menyertainya sehingga mendorong integrasi internasional serta meningkatkan ketergantungan negara-negara berkembang, memungkinkan terjadi integrasi kebudayaan internasional. Suatu negara yang aktif dalam globalisasi, maka harus terbuka dengan adanya perubahan-perubahan dasar tanpa melihat nilai-nilai yang telah disepakati masyarakat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya lokal.

Dengan mencermati pernyataan tersebut, Kabupaten Purwakarta yang terus membangun tak lepas dari pengaruh dan proses globalisasi. Terbukti bahwa Purwakarta merupakan salah satu kabupaten sentra industri di Jawa Barat, sehingga

banyak industri yang berdiri di kawasan ini. Hal ini sangat memengaruhi terhadap perkembangan ekonomi baik dalam skala makro maupun skala mikro. Dalam skala makro akan memengaruhi Penghasilan Asli Daerah (PAD) sedangkan skala mikro memengaruhi sikap hidup warga yang tadinya sebagai petani sekarang berorientasi menjadi buruh. Munculnya sikap hidup untuk menjadi buruh di pabrik-pabrik (industri) akan memengaruhi sikap dan struktur ekonomi suatu komunitas masyarakat lokal.

Perubahan sikap yang disebabkan globalisasi ini sangat ditakutkan oleh para budayawan. Ketika masyarakat Purwakarta yang awalnya berbudaya petani yang selalu didasari oleh sikap hidup *rereongan*, *sabilulungan* dengan tujuan saling membantu, kini berubah menjadi budaya (industri) menjadi buruh yang materialistik, semua diukur dengan materi (upah). Nilai-nilai sosial bergeser dengan nilai-nilai yang terukur dengan uang.

Maran (dalam Tabroni, 2006) menyatakan bahwa kebudayaan akan selalu mengalami perubahan, penting adanya kesadaran akan pentingnya budaya lokal sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya global. Perlu adanya peran pemerintah daerah dalam membangkitkan budaya lokal dengan tanpa meninggalkan sisi positif dari budaya global.

Menyikapi hal tersebut, Bupati Purwakarta melalui Peraturan Bupati Purwakarta No. 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya, sebagai berikut:

Peraturan Desa Berbudaya mencakup sedikitnya 15 hal, yaitu:

- Mengembangkan budaya gotong royong melalui kegiatan kerja bakti.
- Mengembangkan sikap tolong menolong melalui kegiatan "*Beas Perelek*"
- Masyarakat pasangan usia subur wajib menjadi akseptor KB.
- Larangan penyelenggaraan kegiatan hiburan yang berpotensi menimbulkan keributan atau kericuhan.

- Anak yang berusia di bawah umur dilarang mengendarai kendaraan bermotor.
- Masyarakat yang akan menikah harus menempuh proses pemeriksaan kesehatan.
- Masyarakat dan pelajar wajib memiliki tanaman dan hewan peliharaan.
- Anak usia sekolah wajib mengikuti sekolah formal.
- Anak usia sekolah dilarang berada di luar rumah lebih dari pukul 21.00 WIB.
- Masyarakat wajib memadamkan listrik di luar rumah pada saat bulan purnama.
- Tamu wajib lapor ke Ketua RT dan dilarang bertamu lebih dari pukul 21.00 WIB.
- Warga masyarakat yang berumur 17 tahun ke bawah dilarang berpacaran. Warga masyarakat yang berumur di atas 17 tahun dilarang berpacaran baik di dalam maupun di luar rumah lebih dari pukul 21.00 WIB, kecuali didampingi oleh orang tua atau keluarganya.
- Pelarangan kegiatan yang berisi hasutan, fitnah, kebencian, adu domba antar kelompok/golongan yang berpotensi meruntuhkan persatuan, gotong royong dan ketenteraman masyarakat.
- Pelarangan penjualan dan penggunaan minuman beralkohol.

Dengan demikian *beas perelek* sebagai salah satu budaya lokal masyarakat Sunda perlu dilestarikan dalam kehidupan baik di tingkat pemerintah Kabupaten Purwakarta, maupun di tingkat nasional. Hal ini diperlukan untuk menjawab tantangan global melalui orientasi, persepsi, sikap dan cara hidup yang disesuaikan dengan nilai-nilai kekinian yang menyentuh kebutuhan warga masyarakat.

4. Proses Perubahan Sosial Budaya

Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat yang terjadi sepanjang masa. Perubahan ini terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin berubah. Hirschman, mengatakan bahwa kebosanan

manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan¹.

Hubungannya dengan budaya *beas perelek* di Kabupaten Purwakarta, khususnya di daerah perkotaan yang memiliki pluralisme yang sangat tinggi, sehingga kurang adanya kesadaran akan kebersamaan. Masyarakat perkotaan yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka ciri-ciri suatu komunitas cenderung melemah karena kehidupan masyarakat perkotaan semakin kompleks. Kerusakan alam masyarakat dapat mengakibatkan perpecahan, isolasi dan individualisasi. Orang cenderung tidak peduli kepada orang lain (Hikmat, 2001:149-162).

Terkait dengan budaya *beas perelek* yang terjadi di perkotaan (Kota Purwakarta) yang memiliki tingkat heterogenitas tinggi dan adanya perubahan sebagian warga masyarakat dari petani ke masyarakat industri (buruh pabrik), dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka tingkat solidaritas itu bersifat fungsional atau bersifat organik. Program yang diluncurkan pemerintah selalu ditanggapi dengan kritis, tuntutan transparansi sangat tinggi, karena semua harus terukur. Sehingga Pemerintah Kabupaten Purwakarta menanggapi hal tersebut dengan meluncurkan program *e-perelek* dengan website resmi dari pemerintah yang dapat diakses semua warga. Kegunaannya untuk memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat dalam pemberdayaan ini. Pendistribusian *beas perelek* sangat terbuka, selain jumlah beras yang terkumpul juga pendistribusiannya akan terlihat jelas. Di samping itu pemerintah yang bertanggung jawab akan kesejahteraan rakyatnya akan langsung melihat secara kuantitas warga miskin di daerahnya.

Pengelolaan *beas perelek* yang dilaksanakan secara transparan atau terbuka dimulai dari tingkat RT, RW, kelurahan

¹http://id.wikipedia.org/wiki/perubahan_sosial_budaya, diunduh tanggal 22-09-2016.

(desa), kecamatan hingga kabupaten memberikan teladan dan pemberdayaan masyarakatnya dari pemerintah sebagai pengayomnya. Bupati sebagai agen perubahan yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat umum, akan memberikan manfaat secara struktural di dalam pemerintahannya.

Perubahan sosial baik yang direncanakan maupun yang tidak, pada intinya adalah pengupayaan ke arah yang lebih baik dengan mencoba mereduksi dampak negatif dari perubahan sosial. Dengan demikian perubahan sosial ini akan memperkaya khasanah kebudayaan. Maka dengan adanya dinamika kebudayaan tersebut harus dimaknai sebagai upaya pemberdayaan dan pemerdayaan kebudayaan itu sendiri.

5. *Beas Perelek* sebagai pranata sosial (ekonomi)

Beas perelek, sebagai pranata sosial (ekonomi) yang berlaku pada tataran kehidupan masyarakat Sunda (dahulu) dan kini dibangkitkan kembali di Kabupaten Purwakarta, merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang berbasis masyarakat. Hal ini sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Sunda yaitu *silih asih, silih asah, silih asuh*. Falsafah ini dapat dijadikan sebagai dasar program pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan, nilai-nilai *silih asih*, dapat diimplementasikan dalam menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Nilai-nilai ini sesuai bahkan sangat sejalan dengan program *World Bank* dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Sehingga pemberdayaan dilakukan untuk membangkitkan kesadaran potensi sumber daya yang dimiliki dan mengembangkannya secara produktif (*World Bank* dalam Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dirjen PMD Depdagri, 2010:143-144). *Silih asah* yaitu saling memberi, dapat diimplementasikan untuk memperkuat potensi atau daya yang

dimiliki masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memberi kemudahan akses berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Unsur *silih asuh* itu adalah adanya kesamaan hak, dapat digambarkan bahwa adanya pemihakan dari pemerintah kepada masyarakat sehingga tercipta kesinambungan antara program pemerintah dengan masyarakatnya. Begitu pula sikap pemerintah mencoba menjembatani jurang pemisah antara masyarakat yang berkemampuan dengan masyarakat yang kurang mampu dengan program melalui program yang dalam pelaksanaannya harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri. Nilai-nilai *silih asih, silih asah, silih asuh* tersebut dapat difungsikan dan diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat yang dibalut dengan konsep-konsep kekinian.

Hal paling umum adalah bahwa pemberdayaan disepadankan dengan partisipasi, padahal tidak ada sebuah pengertian atau model tunggal pemberdayaan. Ada yang memahami bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas.

Berkaitan dengan program *beas perelek* sebagai pemberdayaan masyarakat yang menekankan partisipasi masyarakat untuk menemukan permasalahan (masyarakat) sendiri. Persepsi partisipasi masyarakat di Indonesia berbeda, antara persepsi yang diartikan pemerintah dan masyarakat. Aparat pemerintah mengartikan partisipasi sebagai kemauan masyarakat untuk mendukung suatu program yang direncanakan dari atas, bukan dari rakyat sendiri. Definisi tersebut pada dasarnya diartikan dengan istilah mobilisasi.

Sedangkan persepsi masyarakat mengandung pengakuan, kreativitas dan inisiatif dari rakyat sebagai model dasar proses pelaksanaan pembangunan (Nasution, 2009:16). Pengertian partisipasi masyarakat sangat cocok dengan program yang diluncurkan Bupati Purwakarta mengenai *beas perelek*, yang menuntut pengakuan dan nilai-nilai kreativitas serta inisiatif rakyat atau warga masyarakat dalam menyukseskan program ini. Hal ini sejalan dengan pendapat Sutrisno (1995) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah merupakan kerjasama yang erat antara perencana (bupati) dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sajogyo (2001:49 dalam Setiawan, 2011:45) menyamakan pengertian partisipasi dengan peran serta dalam pembangunan berarti ikut serta dan berperan dalam, proses itu sebagai pelaku. Peran serta masyarakat dalam hal ini akan sangat membantu keberhasilan program, apabila partisipasi ini dijalankan secara holistik, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

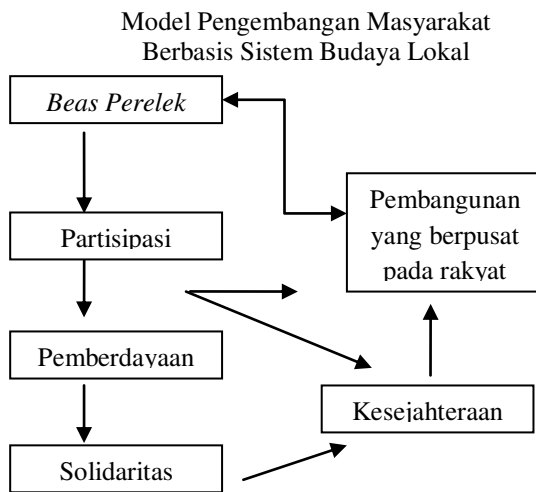
Model pembangunan yang berpusat pada rakyat lebih menekankan pada pemberdayaan (*empowerment*). Model ini memandang inisiatif-kreatif rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material spiritual rakyat sebagai tujuan yang harus dicapai oleh proses pembangunan itu. Kajian strategis pemberdayaan masyarakat baik ekonomi, sosial, budaya maupun politik menjadi penting, menjadi input untuk reformulasi pembangunan yang berpusat pada rakyat. Reformulasi ini memberikan peluang sangat besar bagi masyarakat untuk membangun secara partisipatif (Sekarningrum, 2008:39).

Pemberdayaan masyarakat dalam *beas perelek*, mempunyai makna yang sangat besar dalam membangun masyarakat dalam kemandirian. Dalam *beas perelek* setiap orang dapat berkontribusi atau mendapat kesempatan menyumbangkan sesuatu yang dimilikinya dan sumbangan tersebut dihargai oleh orang lain. Sikap saling menghargai inilah akan mengembangkan sikap saling percaya di antara anggota masyarakat dan pemerintah dan dapat menumbuhkan serta memperkuat solidaritas. Hal ini sangat sesuai dengan falsafah hidup orang Sunda yaitu *silih asih, silih asah, silih asuh*.

6. Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sistem Sosial Budaya Lokal

Berlandaskan Peraturan Bupati Purwakarta No. 70.A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya, untuk mengembangkan budaya gotong royong melalui kegiatan kerja bakti serta mengembangkan sikap tolong menolong melalui kegiatan "*beas perelek*". Maka pada pelaksanaannya, Bupati Purwakarta mengeluarkan Surat Edaran pada tahun berikutnya, No. 511.1/211/Kesra tentang Gerakan Empati Penggunaan Bahan Pangan, yang berisikan anjuran, salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat dengan *Beas Perelek*.

Program *Beas Perelek* merupakan salah satu strategi dalam pemerataan pembangunan yang berakar pada rakyat, dilaksanakan bersama-sama pemerintah dalam memenuhi pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Pembangunan yang berlandaskan kerakyatan lebih menekankan pada pemberdayaan dan memandang inisiatif kreatif sebagai sumber daya pembangunan utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan.



(Sekarningrum, 2008:42)

Konsep pemberdayaan merupakan paradigma baru dalam pembangunan masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, baik perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi.

Priyono dalam Setiawan (2011:84) memberikan makna pemberdayaan masyarakat sebagai upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi, psikologi, dan lain-lain. Memberdayakan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Dasar dari pemberdayaan masyarakat melalui *beas perelek* ini adalah kepedulian sosial dan kegotongroyongan masyarakat. Hal ini merupakan spirit bagi kelancaran pembangunan dan sekaligus merupakan refleksi dari kehidupan masyarakat Sunda khususnya.

D. PENUTUP

Beas perelek, di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat sedang giat dijalankan, sesuai dengan Surat Edaran Bupati. Padahal program *beas perelek* ini merupakan tradisi lama yang

terabaikan, tradisi yang menjadi ciri kehidupan masyarakat Sunda di tatar Sunda (Jawa Barat).

Program *Beas Perelek* yang dihidupkan kembali sangat bermanfaat untuk membantu meringankan beban warga yang kekurangan bahan pangan. Hasilnya *beas perelek* ini dapat digunakan sebagai ketahanan pangan dalam menghadapi musim paceklik maupun dalam menghadapi musibah. Ada beberapa faktor mengapa program *Beas Perelek* ini dapat dijalankan kembali di Kabupaten Purwakarta. Pertama program ini merupakan program lawas, sehingga ada rasa nostalgia bagi para warga, selain itu peran Bupati sebagai agen perubahan mampu membangkitkan kembali dan mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menggerakkan masyarakat untuk mengikuti program yang dicanangkan. *Beas Perelek* menjadi salah satu solusi yang langsung dapat dirasakan masyarakat dalam menghadapi musibah, khususnya dalam ketahanan pangan. *Beas perelek*, sejalan dengan falsafah kehidupan masyarakat Sunda yaitu *silih asih, silih asah, dan silih asuh*.

Program *Beas Perelek* ini merupakan program pemberdayaan masyarakat dan menuntut partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri untuk mencapai kesejahteraan yang merata. Dalam menghadapi tantangan baik lokal, nasional dan regional, terjadi adaptasi nilai-nilai luar (modern) dalam pengelolaan *beas perelek*. Pada awalnya pengelolaan *beas perelek*, sangat sederhana yaitu mengumpulkan beras dan kemudian dibagikan kepada orang yang membutuhkan, dan sebagai persediaan di masa paceklik atau musibah. Kini telah berubah dan berkembang tidak hanya sekadar pengumpulan beras atau tempat penyimpanan persediaan pangan, namun telah menjadi sebuah lembaga ketahanan pangan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa program *Beas Perelek* ini mengalami perubahan seiring perubahan tatanan kehidupan. Perkembangan ekonomi yang begitu pesat sangat mempengaruhi

program *beas perelek*, khususnya di perkotaan. Proses industrialisasi, sangat mempengaruhi sikap hidup masyarakat, dimana dahulu merupakan masyarakat berbudaya petani berubah menjadi industri.

Selain itu, perubahan terjadi karena situasi dan kondisi zaman yang menuntut transparansi atau keterbukaan, *beas perelek* berkonsep *e-perelek*. Artinya sistem informasi dibuka sedemikian rupa, sehingga semua warga dapat memantau dengan baik.

Program *Beas Perelek* sejalan dengan nilai-nilai falsafah hidup manusia Sunda, yaitu *silih asih, silih asah, silih asuh* yang dapat difungsikan sebagai alat untuk mengatasi salah satu masalah kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya yang ada dalam masyarakat Sunda. Banyak budaya lokal yang sebenarnya dapat dijadikan dasar sebagai modal sosial yang dapat berkontribusi dalam pembangunan, baik itu sebagai antisipasi ataupun memberi solusi. *Beas perelek* dan falsafah hidup manusia Sunda *silih asah, silih asih, dan silih asuh*, merupakan modal sosial yang dapat menunjang pembangunan.

Kebudayaan akan selalu berubah atau dinamis. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu adanya kesadaran akan budaya lokal sebagai penangkal terhadap pengaruh budaya luar (global). *Beas perelek* merupakan salah satu solusi dalam menangkal pengaruh tersebut. Dalam hal ini peran pemerintah (Bupati Purwakarta) sebagai agen perubahan tampil sebagai pelestari budaya lokal tersebut. Budaya lokal *beas perelek* merupakan pemberdayaan masyarakat yang berazaskan kebersamaan dan gotong royong melalui partisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial.

Dari sudut pandang aplikasi, *beas perelek* yang berbasis nilai-nilai budaya lokal, terlihat memadai untuk direvitalisasi sebagai sebuah pranata ekonomi yang menunjang dan mendukung ekonomi masyarakat, khususnya ketahanan pangan. Dukungan tersebut didasari oleh fungsi *beas perelek* yang tidak hanya semata-

mata berfungsi ekonomi, melainkan juga memiliki fungsi-fungsi sosial yang sinergis dengan masyarakat.

Kabupaten Purwakarta merupakan kabupaten yang tidak termasuk rawan pangan, namun masyarakatnya mau menerima program *beas perelek* sebagai sebuah kekayaan tradisi lama yang dihidupkan kembali. Kabupaten Purwakarta didorong menjadi kabupaten yang berlandaskan budaya lokal yang kental. *Beas perelek*, menjadi ikon kehidupan masyarakat Purwakarta. Namun demikian perlu langkah-langkah dalam pelestarian program ini, yaitu:

- a. *Beas perelek*, perlu disosialisasikan kepada generasi muda, karena memiliki nilai-nilai positif dan kebersamaan serta partisipasi.
- b. *Beas perelek*, merupakan modal sosial dalam pembangunan perlu dilestarikan dan dukungan penuh dari pemerintah, sehingga ketika penggagasnya (Bupati) diganti, *beas perelek* tidak ikut berhenti.
- c. *Beas Perlek*, merupakan sistem kebersamaan yang bersifat kegotongroyongan, perlu dipertahankan, agar kebersamaan masyarakat tetap terjaga dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR SUMBER

1. Makalah dan Tesis

- Kartasasmita, Ginandjar. 1997.
Pemberdayaan Masyarakat. Makalah.
17-18 Maret.
- Sekarningrum, 2008.
"Gerakan Rereongan Sarupi" dalam
*Sistem Sosial Budaya Indonesia:
Pranata Sosial Lokal Indonesia*.
Bandung: Program Pascasarjana
Universitas Padjadjaran.
- Suryalaga, Hidayat. 1995.
*Jati Diri, Sikap dan Nilai-nilai Budaya
Sunda "Upaya Mencari Kiat untuk
Menemukembali Jatidiri, Sikap dan Nilai
Budaya Sunda dan Upaya Transfor-
masinya"*. Makalah.

2. Buku

- Hikmat, Harry. 2001.
Strategi Pemberdayaan Masyarakat.
Bandung: Humaniora Utama Press
Bandung.
- Johson, Doyle Paul. 1986.
Teori Sosiologi Klasik dan Modern.
Jakarta: Gramedia.
- Kusnadi. 2006.
*Filosofi Pemberdayaan Masyarakat
Pesisir*. Bandung: Humaniora Utama
Press.
- Nasution, Zulkarnaen. 2009.
*Solidaritas Sosial dan Partisipasi
Masyarakat Desa Transisi* . Cetakan I.
Malang: UMM Press.
- Sajogyo. 2001.
Hubungan antara Daerah dan Desa.
Bogor: FPPM.
- Sarundajang. 2000.
Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah.
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Satjadibrata, 1948.
Kamoes Basa Soenda. Djakarta: Bale
Poestaka.
- Setiawan, Danny. 2011.
*Wajah Desa Kita: Dimensi SDM,
Politik, Ekonomi*. Bandung: Pusat
Kajian Pemberdayaan Desa.
- Tabroni, Roni. 2006.
*Transformasi Sosial Berbasis Kearifan
Lokal*. Bandung: Humaniora Utama
Press Bandung.
- Pedoman Umum P2KP-3, Edisi Oktober 2005.
- Dirjen PMD Depdagri. 2010.
*Pedoman Pemberdayaan Masyarakat
Desa*.

3. Internet

- <http://daluwang.purwakartakab.go.id/laporan-eperelek/> Diunduh Tanggal 24 Sep 2016.
- Http://id.wikipedia.org/wiki/perubahan_sosial_budaya. Diunduh tanggal 22-09-2016